
**POLITIK KEKERABATAN BERBASIS SUMBER DAYA BIROKRASI PADA
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA
SELATAN**

Putri

Universitas Bangka Belitung

Email: putrithra@gmail.com

Ibrahim

Universitas Bangka Belitung

Email: iim_babel@yahoo.com

Novendra Hidayat

Universitas Bangka Belitung

Email: novendra@ubb.ac.id

Abstrak

Politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi pada pemilihan legislatif merujuk pada praktik dimana kandidat atau partai politik menggunakan hubungan keluarga dan kekuasaan yang dimiliki dalam birokrasi untuk memperoleh dukungan dan upaya memenangkan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terkait bentuk pemanfaatan dan faktor pendorong adanya politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bangka Selatan. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori kekerabatan oleh Schneider (1968) dan teori mobilisasi sumberdaya oleh Oberschall (1973). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana sumber data primer didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yang dapat mendukung informasi primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemanfaatan dari politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi ini memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan pilihan dan dukungan politik seseorang. Hal tersebut terlihat dari dukungan keluarga yang diberikan melalui mobilisasi sumberdaya. Faktor determinan kemunculan dan keberhasilan dari teori mobilisasi sumber daya ini terdiri dari lima hal diantaranya gerakan organisasi sosial, pemimpin dan kepemimpinan, sumber daya dan mobilisasi sumber daya yang diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu sumber daya moral, sumber daya budaya, sumber daya sosial-organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya material, kemudian jaringan dan partisipasi, serta peluang dan kapasitas masyarakat. Upaya untuk memberikan dukungan suara kepada keluarganya, aktor birokrasi dibatasi oleh peraturan dan jabatan publik sehingga mobilisasi tidak dilakukan secara maksimal. Selain itu, faktor pendorong dari pengalokasian sumber daya birokrasi pada politik kekerabatan tersebut dapat dilihat dengan adanya keinginan memperpanjang kekuasaan, strategi pertahanan dan perlindungan jabatan bagi aktor birokrasi yang terlibat. Tidak hanya itu pengalokasian didukung karena untuk memperkuat jaringan kerja antara birokrasi dan legislatif. Lemahnya sistem rekrutmen dalam partai politik serta rendahnya pandangan masyarakat terhadap sistem politik dan juga adanya pengaruh dari kepentingan ekonomi memberi ruang dan kesempatan untuk mendorong perkembangan politik kekerabatan di birokrasi yang terjadi di pemilu 2024. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi birokrasi ketika menjelang pemilu yang terkadang kurang dapat profesional.

Kata Kunci: Politik Kekerabatan, Mobilisasi Sumber daya, Birokrasi

Abstract

In legislative elections, kinship politics refers to the use of familial connections and bureaucratic influence by candidates or political parties to secure support and achieve electoral victory. This research aims to identify the forms of utilization and the driving factors of kinship politics based on bureaucratic resources in the legislative elections in South Bangka Regency. The theories used are the Kinship Theory by Schneider (1968) and the Resource Mobilization Theory by Oberschall (1973). The research utilized a qualitative methodology and a descriptive approach, gathering primary data from interviews, observations, and documentation and supplementing it with secondary data from library items that validated the original information. The results of this study revealed that this form of bureaucratic resource-based kinship politics has a significant influence on one's political choices and support. This is exemplified by the provision of family support through resource mobilization. The emergence and success of this resource mobilization theory are determined by five factors social organization movements, leaders and leadership, resources, and resource mobilization. These factors are categorized into five types moral resources, cultural resources, socio-organizational resources, human resources, and material resources. Additionally, networks and participation, as well as opportunities and community capacity, play a significant role. Efforts to offer voting assistance to his family are constrained by regulations and public roles, resulting in suboptimal mobilization by bureaucratic actors. The driving motives for the allocation of bureaucratic resources in kinship politics are evident in the pursuit of power, defensive strategies, and the safeguarding of positions for the involved bureaucratic players. The allocation justifies itself by strengthening the link between the bureaucracy and the legislative branch. The weak recruitment system in political parties, the public's low perception of the political system, and the impact of economic interests create space and opportunities for the growth of kinship politics within the bureaucracy during the 2024 elections. The bureaucracy, which sometimes lacks professionalism, faces a challenge in the run-up to the election.

Keywords: *Kinship politics, resource mobilization, bureaucracy*

PENDAHULUAN

Pemilu serentak di Indonesia pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2019, sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 dibacakan, mengenai hal tersebut sistem pemilu mengalami konstruksi demokrasi yang bersejarah. Sebelumnya, pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan secara terpisah. Pemilihan legislatif menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan legislatif di Indonesia merupakan bagian integral dari pemilu yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. (Abra, 2019).

Pemilihan legislatif dalam pemilu serentak di tahun 2024 telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Pada Pileg tahun 2024 ini, menampilkan begitu banyak petarung yang berusaha untuk meraih suara rakyat dan duduk di kursi parlemen, salah satunya petarung yang memiliki jaringan kekerabatan dengan politisi atau aktor birokrasi. Adanya jaringan kekerabatan menjadikan mereka punya ruang lebih dibandingkan dengan kandidat lainnya. Dinamika terkait adanya ikatan kekerabatan dalam pemilu 2024 sangat terlihat subur dari waktu ke waktu. Trah politik dari pejabat publik yang sedang berkuasa atau pernah menjabat di eksekutif dan legislatif menunjukkan gejala untuk merawat kekuasaan melalui tangan-tangan estafet keluarganya. Fenomena terkait politik kekerabatan ini telah banyak ditunjukkan oleh beberapa daerah di Indonesia salah satunya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memasuki zona darurat politik kekerabatan di pemilu 2024.

Kepulauan Bangka Belitung dinamika politik yang dipengaruhi oleh faktor politik kekerabatan pada proses pemilu ini dapat diidentifikasi dari beberapa caleg yang memiliki ikatan keluarga dengan politisi yang memiliki kekuasaan di tingkat eksekutif maupun legislatif. Terdapat 27 caleg yang teridentifikasi yang bertarung pada pemilihan legislatif tahun 2024 memiliki ikatan kekerabatan dari 15 politisi se-Kep. Bangka Belitung yang sedang berkuasa atau yang sudah pernah menjabat di eksekutif seperti Gubernur, Bupati, Walikota, dan ditingkat legislatif seperti DPD RI, DPR RI hingga DPRD. Mengenai beberapa trah politik kekerabatan yang terjadi di lingkaran politisi ini telah memperlihatkan bahwa gejala politik kekerabatan ini sangat mengkhawatirkan. Dalam penelitian Raissoevel (2022) menyatakan bahwa politik kekerabatan merupakan sebuah penghambat bagi masyarakat untuk memenuhi hak-hak sosial serta politiknya dimana masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam proses politik. Namun adanya praktik politik kekerabatan ini telah memberikan kecacatan pada demokrasi karena telah merubah makna

demokrasi bahwa seluruh rakyat mempunyai hak serta peluang yang sama dalam proses politik yang menghasilkan sebuah kekuasaan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya bentuk dari politik kekerabatan yang bersifat destruktif ini diantaranya pertama, terkait aturan hukum yang memungkinkan kebijakan politik kekerabatan itu terjadi. Kedua, sistem kepartaian yang belum demokratis. Dimana peran partai politik dalam menyuburkan dan menumbuh kembangkan politik kekerabatan di semua level. Dalam mekanisme pencalonan dalam partai politik, tumbuhnya oligarki atau lingkaran elit di dalam tubuh partai politik telah menunjukkan ketidakwajaran. Ketiga, tingginya biaya atau ongkos politik. Tingginya biaya politik telah membuat politik kekerabatan menguatkan perannya dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki, agar mampu memenuhi kepentingan-kepentingan keluarga atas apa yang telah dimiliki. Keempat persepsi masyarakat terhadap politik kekerabatan masih rendah serta kurangnya evaluasi politik kekerabatan. Faktor keempat inilah yang menjadi sebuah alasan mengapa politik kekerabatan begitu populer di negara ini.

Kepopuleran politik kekerabatan saat ini bukan hanya berada di lingkaran politisi eksekutif tetapi juga telah masuk ke dalam birokrasi pemerintahan pada pemilu 2024. Hal tersebut terlihat dari beberapa keluarga dari aktor birokrasi juga melanggengkan fenomena dan merawat kekuasaan melalui tangan-tangan estafet keluarganya di pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa kekerabatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik dan birokrasi pemerintah. Birokrasi dapat diartikan dalam bahasa Yunani yaitu *Cratein* yang mempunyai arti mengatur dan jika di artikan dalam bahasa Prancis, birokrasi berasal dari kata *bureau* yang mempunyai arti kantor atau meja tulis. Setiawan (2014), berpendapat dalam bukunya yang berjudul “*Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*” bahwa birokrasi merupakan sistem kerja pemerintahan demi mencapai tujuan dari Negara secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu perlunya objektif dan terbuka, dalam memahami bahwa tata kerja birokrasi ini untuk tujuan bersama bukan bentuk individu atau perorangan. Birokrasi didefinisikan sebagai sebuah organisasi keseluruhan pemerintah yang menjalankan tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintahan dibawah presiden dan lembaga-lembaga non departemen, baik itu yang di pusat, maupun di daerah seperti halnya di tingkat provinsi, kabupaten, serta kecamatan, kelurahan hingga desa.

Menurut penelitian Rayadi (2014) dalam hubungan politik dan birokrasi, pemilu adalah ujian bagi birokrasi untuk menilai apakah birokrasi sudah berjalan secara profesionalitas dan berfungsi sebagai pelayan publik dan bukanlah sebagai alat kekuasaan

yang mudah terkooptasi dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Politisi birokrasi dapat dikatakan bersifat resiprokal, dimana adanya hubungan saling mendukung secara politik, baik itu dari pihak birokrasi maupun politisi itu sendiri. Seperti diketahui bahwa politisi membutuhkan birokrasi sebagai sebuah mesin politik dan birokrasi membutuhkan dukungan dari politisi sebagai bentuk sarana penunjang karir.

Masalah terkait politisasi birokrasi menjadi persoalan hampir di seluruh daerah (Suryanjari, 2009). Seperti halnya pada pemilu 2024 ini, tren politik kekerabatan dengan sumber daya birokrasi dengan salah satu parpol atau caleg dalam pemilu 2024 ini akan mudah memberi dukungan. Adanya jaringan kekerabatan seringkali melibatkan birokrasi dalam politik seperti menjadi tim sukses salah satu caleg dan memobilisasi bawahan dan massa di sekitarnya untuk melakukan dukungan kepada calon tersebut. Pemanfaatan suara pegawai birokrasi ini jelas sangat mudah bagi kandidat Keadaan tersebut dilihat dari adanya beberapa praktik-praktik yang terjadi seperti halnya penggunaan sumber daya birokrasi untuk memenuhi kepentingan politik. Mobilisasi pegawai birokrasi saat pemilu/pilkada telah banyak terjadi pada tingkat pemilihan Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga pusat (Yunus, 2017).

Penelitian ini difokuskan pada aktor birokrasi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Seperti yang telah diidentifikasi sebelumnya bahwa politik kekerabatan ini terjadi di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, namun Kabupaten Bangka Selatan teridentifikasi bahwa dalam lingkaran birokrasi banyak dari aktor birokrasi yang terjaring dalam politik kekerabatan sehingga memunculkan sifat yang kurang profesional dan menyebabkan bentuk ketidaknetralan birokrasi karena cenderung berpihak dan mendukung keluarganya tanpa melihat kualitas dari kandidat tersebut. Adanya ikatan kekerabatan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam pemilu karena kurangnya profesionalitas menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi nilai demokrasi dari pemilih itu sendiri. Para aktor birokrat yang mengedepankan hubungan personal dan menguntungkan bagi salah satu kandidat yang bersangkutan.

Berikut keluarga aktor birokrasi bertarung pada Pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu :

Tabel 1. Identifikasi Politik Kekerabatan Dalam Birokrasi Pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Bangka Selatan.

Nama	Pemilihan	Kerabat	Jabatan Birokrasi
Bahroni	DPRD Kabupaten	Evi Sastra	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bangka Selatan
Hessy Afrianti	DPRD Kabupaten	Hefi Nuranda	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Selatan
Istiya Marwinda	DPRD Kabupaten	Benny Supratama	Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Bangka Selatan
Tony Purnama	DPRD Provinsi	Benny Supratama	

Sumber Data: Kelola oleh Penulis, 2024

Kandidat yang memiliki jaringan kekerabatan dengan aktor birokrasi ini akan mendapatkan point lebih dari masyarakat yang dilihat dari latarbelakang keluarga yang dimiliki dukungan melalui mobilisasi sumber daya dari kerabatnya tersebut. Hal inilah yang membuat birokrasi terkadang tidak dapat profesional. Dimana hubungan pegawai birokrasi ikut menjadi bagian dari kekuatan politik bagi salah satu kandiad. Sehingga politik dan birokrasi ini merupakan sebuah ujian di dalam pemilu. Penelitian ini mencoba melihat politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi terjadi pada pemelihan legislatif pada pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Selatan.

Lebih luasnya, melihat bagaimana bentuk pemanfaatan politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi serta apa saja faktor pendorong pengalokasian sumber daya birokrasi pada politik kekerabatan yang terjadi pada pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Selatan. Dimana saat ini bentuk kekerabatan di dalam birokrasi tidak hanya dilihat dari keluarga yang memiliki hubungan darah/pernikahan saja tetapi kekerabatan yang dilihat dari kedekatan sebagai rekan kerja sehingga terbentuknya rasa kekeluargaan yang saling mendukung. Maka dari itu bentuk kekerabatan di birokrasi dianggap lebih mudah memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan dukungan politik kepada calon politik tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian yang lebih menekankan pada kedalaman dan kekayaan data penelitian.

Menurut Bodgan dan Taylor dalam penelitian Jumrah (2018), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang-orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, memahami bahasa mereka dan penafsirannya terhadap dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang relevan terkait fokus penelitian dengan tujuan mencoba dan memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Sedangkan secara teori, pendekatan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid tentang fenomena yang terjadi, yaitu peristiwa yang terjadi secara ilmiah (Jumrah, 2018).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-September 2024

Target/Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif jika salah satu sumber datanya diperoleh melalui hasil sebuah wawancara, maka peneliti memerlukan peran informan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan untuk kepentingan data penelitian. Maka dari itu peran informan sangat penting dan dibutuhkan dalam penelitian sebagai seseorang yang menjadi sumber data. Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang dipakai yaitu teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. *Purposive Sampling* ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti seseorang yang dinilai paling tahu terkait yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2017). Adapun informan dari penelitian ini adalah aktor birokrasi, bawaslu, partai politik, dan masyarakat Kab. Bangka Selatan.

Prosedur

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui hasil wawancara kepada responden/narasumber dan hasil observasi. Data primer ini merupakan data utama dalam penelitian ini. Dengan pengambilan data

secara langsung kepada narasumber yang mana sebagai subjek utama dalam penelitian ini akan memberikan informasi yang relevan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder sering menjadi data penunjang dalam sebuah penelitian. Data ini diperoleh dari beberapa penelitian lain maupun dari beberapa informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan seperti buku, jurnal, media massa, artikel, publikasi ilmiah serta sumber-sumber lain baik dari internet maupun literatur kertas yang relevan dengan substansi penelitian ini.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses yang mengacu pada penggalian informasi terkait data dan keterangan dari informan secara mendalam dengan cara bertanya baik secara langsung maupun tidak langsung (Siswandi, 2020). Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan informan-informan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kapabilitas dan pengetahuan informan terhadap bentuk pemanfaatan politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi dan faktor pengalokasian sumber daya birokrasi pada politik kekerabatan pada Pemilihan legislatif tahun 2024 khususnya pemilihan legislatif di Kabupaten Bangka Selatan.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses pengamatan secara langsung oleh peneliti. Observasi dilakukan pada awal menentukan lokasi penelitian dengan melakukan pengumpulan data hingga pra-survei. Teknik observasi atau pengamatan ini dipakai secara langsung terkait perilaku personal (Rukajat, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung sehingga mengharuskan peneliti berada di Kabupaten Bangka Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data secara bukti fisik dalam sebuah penelitian. Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mengumpulkan data visual untuk kepentingan peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto, data di internet, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data yakni bagian proses pemilihan data terkait data mana yang diperlukan dan data mana yang tidak diperlukan. Hal tersebut karena tidak semua data yang didapatkan dari informan harus dijabarkan di dalam hasil penelitian. Data-data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan akan dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan kebutuhan data peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah dari penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan analisis data yang mana data yang telah dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Data yang telah dikelompokkan sesuai dengan hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi sebelumnya akan disajikan secara visual agar dapat mendeskripsikan data secara relevan. Langkah ini dilakukan dengan menyediakan sekumpulan informasi yang sudah tersusun secara sistematis tersebut untuk keperluan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam teknik analisis data. Penarikan kesimpulan ini adalah sebuah proses yang dilakukan peneliti sebagai bentuk interpretasi atas temuan pada saat melakukan pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemanfaatan Politik Kekerabatan Berbasis Sumber Daya Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan

Pada masa reformasi sekarang ini, birokrasi sering dijadikan sebuah alat untuk menciptakan dukungan politik mengatasnamakan kekerabatan dengan peserta pemilihan legislatif tahun 2024. Pada pemilu 2024 di pemilihan legislatif, tren politik kekerabatan dengan aktor birokrasi menjadi sebuah bentuk keunggulan tersendiri bagi kandidat peserta pemilu untuk memperoleh dukungan. Birokrasi dijadikan sebuah sumber daya yang dimanfaatkan untuk menciptakan arus dukungan massa yang besar dalam pemilu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan aktor birokrasi.

Adapun hubungan saluran kekerabatan yang berbasis sumber daya birokrasi pada penyelenggaraan pemilu sering kali merujuk pada hubungan personal antara individu dengan caleg yang didasarkan pada hubungan keluarga atau afiliasi pribadi. Hubungan keluarga merupakan akses utama dari terbentuknya politik kekerabatan. Dalam hubungan keluarga terdiri dari dua jenis kekerabatan diantaranya yaitu: hubungan pernikahan (*Affinal Kinship*) dan hubungan darah (*Consanguineal Kinship*). Hubungan pernikahan (*Affinal Kinship*) merupakan sistem kekerabatan yang didasarkan pada hubungan antara suami dan istri yang telah diikat dengan status pernikahan. Selain itu hubungan kekerabatan ini seperti menantu dan mertua, kakak ipar atau adik ipar. Kemudian kekerabatan yang didasarkan hubungan darah (*Consanguineal Kinship*) merupakan sistem kekerabatan yang dikenal dengan sebutan kekerabatan berdasarkan keturunan. Seperti halnya hubungan antara orang tua dan anak, hubungan paman dan keponakannya (Jumrah, 2018).

Realita yang terjadi sekarang dalam pemilihan legislatif adanya fenomena yang diselimuti dengan jaringan kekerabatan yang dilihat dari satu keturunan atau satu keluarga. Politik kekerabatan dalam bahasa sederhana dapat dipahami sebagai sebuah rezim kekuasaan politik yang dijalankan secara turun-temurun berdasarkan satu keluarga maupun kerabat dekat (Faisol, 2018). Terdapat dua pendekatan untuk memahami bentuk pemanfaatan dari adanya hubungan keluarga dalam politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi diantaranya yaitu sumber daya jaringan dan sumber daya identitas.

1. Sumber Daya Jaringan

Keluarga sebagai sumber daya jaringan yang digunakan untuk memberi dukungan secara lebih luas. Mengenai hal tersebut, struktur keluarga dan klan merupakan bagian dari salah satu jaringan potensial yang dapat diandalkan oleh politisi untuk memobilisasi dukungan. Namun di situasi saat ini klan sangat memiliki pengaruh penting dalam mengatur afiliasi sosial yang dimana keluarga politik akan lebih menonjol di lihat dari jaringan keluarganya yang sebagai aktor birokrasi (Aspinal, 2016).

Ikatan secara emosional tersebut sangat sulit untuk diubah dengan demikian preferensi politik aktor birokrasi di Kabupaten Bangka Selatan dipengaruhi oleh pertimbangan ikatan keluarga. Ketidaknetralan aktor birokrasi dalam dukungan legislatif tersebut mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan proses pemerintahan karena dukungan yang diberikan tidak didasarkan pada visi-misi

dari caleg tersebut namun adanya ikatan kekerabatan yang didasarkan hubungan keluarga. Birokrasi sangat vital mengenai penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, sehingga profesionalisme birokrasi mutlak menjadi derap, ruh, serta langkah setiap aparat birokrasi. Politik kekerabatan telah menjadi tantangan bagi birokrasi untuk netral dan kurang profesionalitas. Ada beberapa tipe birokrasi ideal yang diberikan oleh Weber yaitu salah satunya terkait Tipe birokrasi ideal yang dijelaskan oleh Weber bahwa individu pejabat secara personal bersifat bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas memakai jabatannya untuk kepentingan dan keperluan pribadinya termasuk keluarganya. Setiap pejabat terletak dibawah pengawasan dan pengendalian suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Melalui tipe ideal yang dijelaskan oleh Weber tersebut mestinya dapat dijadikan acuan dalam membuat model birokrasi yang ideal dan profesionalitas (Firmas, 2011).

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki peran penting dalam menanggapi terkait beberapa peraturan mengenai pemilu kepada setiap instansi-instansi pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Selatan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dan menjalankan aturan pemilu dengan benar, sehingga terciptanya proses pemilu yang bersifat demokratis, jujur, dan adil. Dalam pengawasan mengenai pilihan politik seseorang bukan ranah Bawaslu. Namun Bawaslu secara aktif mensosialisasikan peraturan pemilu kepada pemerintah baik secara langsung melalui penyebaran x benner maupun melalui stakeholder. Strategi ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi, pemantauan, dan kerjasama dalam membangun pemahaman bersama dengan pemerintah tentang peraturan pemilu.

2. Sumber Daya Identitas

Keluarga atau klan dapat dianggap sebagai kategori sumber daya identitas seperti halnya kategori lain (etnis, wilayah, agama, budaya dll). Kategori tersebut dibangun dengan melihat bagaimana setiap individu mendorong diri mereka menjadi bagian dari identitas tersebut. Adanya sebuah identitas ini memperluas jaringan dan ikatan kekeluargaan. Dengan mempeluas pendekatan ini jaringan keluarga akan diidentifikasi secara luas dan digunakan secara politis. Sumber daya identitas ini digunakan oleh sebagai atribut politik kekerabatan yang dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan sebagai alat pemberi sinyal, seperti halnya bahwa adanya kekerabatan ini akan membawa kandidat yang bersangkutan memiliki dukungan politik secara luas.

Simbol budaya kekerabatan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu, dan menghormati yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Budaya dijadikan sebuah sumber daya identitas yang dimanfaatkan dalam politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi dimana budaya bagian dari bentuk kebersamaan yang telah ada di dalam masyarakat. Bentuk politik kekerabatan itu adalah bentuk hubungan yang dinikmati bersama dilihat dari sebuah kebersamaan, keakraban, dan kerja sama. Mengenai hal tersebut memungkinkan telah menjadi budaya di masyarakat sehingga bentuk adanya hubungan kekerabatan dengan sumber daya birokrasi akan mempermudah dalam mendapatkan dukungan melalui kerja sama dan hubungan yang baik.

Sistem kekerabatan adalah salah satu sistem yang memiliki pengaruh besar dalam struktur sosial dalam suatu masyarakat. Kekerabatan merupakan salah satu bagian dari prinsip dasar dalam mengatur individu ke dalam kelompok sosial. Hubungan sosial merupakan identifikasi perilaku timbal balik. Hubungan antar kerabat dan kegunaan sistem ini bertujuan untuk merekatkan hubungan-hubungan dan kerja sama di dalam berbagai macam kehidupan sosial, ekonomi, serta keluarga. Adanya sebuah identitas ini memperluas jaringan dan ikatan kekeluargaan. Pada konteks ini, tradisi dan nilai-nilai budaya memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Bentuk pemanfaatan kekuasaan melalui politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi pada pemilu 2024, dapat dilakukan dengan strategi mobilisasi sumber daya yang digunakan oleh aktor birokrat untuk mengorganisir suatu dukungan untuk mencapai tujuan. Disimpulkan bahwa faktor determinan dalam suatu gerakan sosial menurut teori mobilisasi sumber daya ialah:

1. **Organisasi Gerakan Sosial**

Dalam buku Sukmana (2016), McLaughlin yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menonjol dari suatu gerakan sosial antara lain harus adanya sistem nilai kebersamaan, perasaan yang sama dari komunitas, adanya norma tindakan, serta struktur organisasi yang jelas. Selanjutnya Killian menyatakan kesimpulannya bahwa pada intinya dalam gerakan sosial mengungkapkan bahwa karakteristik pentingnya yaitu organisasi. Organisasi gerakan sosial dimana struktur organisasi menjadi faktor penting dalam memobilisasi sumber daya dan bergerak bersama dalam mencapai tujuan yang di inginkan. Dalam konteks politik kekerabatan di Kabupaten Bangka

Selatan, jaringan kekerabatan yang kuat sering kali terlibat dalam organisasi terstruktur. Partai politik didirikan dengan tujuan bersama, seperti sebagai wadah yang digunakan dalam proses memenangkan pemilu, mempengaruhi kebijakan publik, dan mewakili adanya kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat. Melalui partai politik mempermudah melakukan mobilisasi dan menarik dukungan dari masyarakat, mengorganisir kampanye untuk mencapai tujuan politik melalui gerakan sosial. Keluarga atau kerabat yang mempunyai posisi yang strategis dalam birokrasi dapat mempengaruhi jalannya kampanye dalam pemilihan legislatif.

2. **Pemimpin dan Kepemimpinan**

kepemimpinan dan pemimpin menurut Oberschall kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan dalam mempengaruhi individu atau kelompok dan seorang pemimpin sama halnya dengan penentu dari berjalannya suatu gerakan sosial. Dalam mobilisasi sumberdaya strategi kali ini dimanfaatkan melalui kedudukan yang dimiliki aktor birokrasi untuk dapat dijadikan keunggulan dalam memperoleh keuntungan politik seperti mempererat solidaritas kekerabatan dalam lingkungan birokrasi sehingga dalam politik kekerabatan, sumber daya birokrasi bisa berupa posisi strategi dalam pemerintahan yang digunakan untuk menggerakkan massa. Keluarga atau kelompok elit yang berkuasa cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ini dibandingkan kandidat independen atau kelompok yang tidak terhubung secara kekerabatan dengan birokrasi.

3. **Sumber Daya Dan Mobilisasi Sumber Daya**

Gerakan sosial efektif memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya moral yang diberikan melalui dukungan politik untuk keluarganya mencalonkan diri pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian sumberdaya kultural, sumberdaya ini digunakan untuk melakukan sosialisasi dan rekrutmen kepada pendukung serta membantu gerakan memelihara kesiapan dan kapasitas mereka untuk tindakan kolektif. Sumberdaya organisasi-sosial yang dilihat dari struktur organisasinya, jaringan, dan kemampuan koordinasi. Dalam politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi ini, sumberdaya organisasi-sosial dimanfaatkan dengan memperkenalkan kekerabatannya secara langsung kepada rekan kerja serta jaringan-jaringan yang dimiliki di lingkungan kerja. Lalu, sumberdaya manusia, sumberdaya ini merupakan sumberdaya yang paling nyata dimana sumberdaya ini dapat dilihat dari dukungan keluarganya langsung untuk

memberikan suara kepada keluarganya. Terakhir, sumberdaya material, sumberdaya ini dapat berupa modal finansial atau fisik. Sumberdaya ini mendapatkan perhatian besar karena finansial selalu dilibatkan dengan uang. Dalam analisis politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi, sumberdaya ini tidak digunakan karena para aktor birokrat melakukan mobilisasi dukungan tanpa sogokan atau uang. Ungkapan aktor birokrat bahwa mobilisasi hanya dilakukan dengan orang terdekat tanpa ada unsur paksaan.

Dari beberapa mobilisasi sumberdaya yang dilakukan berdasarkan analisis menyatakan bahwa dukungan politik diberikan karena adanya unsur kekeluargaan, namun dukungan tersebut tidak dilakukan secara maksimal karena terhalang oleh jabatan publik yang dapat merusak profesionalitas dari aktor birokrasi tersebut. Sehingga semua kandidat yang terlibat tidak satupun yang duduk dalam kursi legislatif dan tidak menggunakan sumberdaya birokrasi dalam mencari dukungan secara maksimal.

4. Jaringan dan Partisipasi

Jaringan dan partisipasi adalah bagian yang sangat penting dalam suatu gerakan sosial. Keberhasilan suatu organisasi sosial dapat dilihat dari sejauh mana mobilisasi individu dan kelompok dalam mendukung gerakan (Sukmana, 2016). Dalam analisis politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi mobilisasi dilakukan dengan mempengaruhi individu untuk memberikan suara dan kelompok dalam mencapai tujuan politiknya yaitu mendapatkan suara bagi keluarganya. Individu dalam hal ini rekan kerja sebagai simpul yang terikat seperti hubungan persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama dll.

5. Peluang dan Kapasitas Masyarakat

Terdiri dari dua perspektif untuk menganalisis dasar. Dua pendekatan tersebut menekankan bahwa kemampuan masyarakat lokal untuk mengorganisir suatu tindakan kolektif tergantung atas sumberdaya, yang utamanya yaitu personel dan dana, namun juga meliputi dukungan moral dan legitimasi untuk membentuk struktur yang lebih bisa bertahan yang dapat digunakan sebagai basis dari tindakan kolektif masyarakat. Politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi memandang bahwa masyarakat lokal cenderung memilih kandidat yang memiliki sumberdaya personal dan sumberdaya moral yang mendukung di belakangnya. Adanya ikatan kekeluargaan dengan salah satu aktor birokrasi telah menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk

menentukan pilihan politiknya dan menjadi nilai lebih bagi kandidat yang terlibat tersebut.

B. Faktor Pendorong Pengalokasian Sumber Daya Birokrasi Pada Politik Kekerabatan Pada Pemilihan Legislatif 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan

Faktor pendorong pengalokasian sumber daya birokrasi pada politik kekerabatan yang berlangsung pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan yaitu adanya berkeinginan memperpanjang kekuasaan, strategi mempertahankan dan perlindungan jabatan, memperkuat relasi kerja, lemahnya proses rekrutmen partai politik, rendahnya pandangan masyarakat terhadap politik kekerabatan, adanya pengaruh kepentingan ekonomi.

1. Berkeinginan Memperpanjang kekuasaan

Kekuasaan merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Adanya jaringan atau ikatan kekerabatan biasanya selalu beriringan dengan sebuah kekuasaan sehingga kekuasaan dipandang sebagai bentuk dorongan yang selalu ada di dalam proses politik. Hal tersebut dikarenakan di era modern saat ini banyak dari aktor politik yang menggunakan kekuasaannya untuk melibatkan keluarganya untuk terjun ke dalam dunia politik hal ini terlihat di berbagai daerah menjelang pemilu khususnya dalam pemilihan legislatif. Secara tidak langsung melalui pemilihan legislatif 2024 ini merupakan wadah untuk memperluas kekuasaan melalui kerabatnya. Pengalokasian sumber daya birokrasi pada politik kekerabatan ini sering kali dijadikan tujuan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan itu sendiri melalui strategi politik, pengembangan jaringan, atau penguatan posisi.

2. Strategi Mempertahankan dan Perlindungan Jabatan

Menempatkan anggota keluarga dalam kekuasaan politik tersebut telah menjadi bagian dari strategi perlindungan jabatan dan mempertahankannya. Membangun lingkaran yang sebagian terdiri dari anggota keluarganya pada posisi politik yang strategis merupakan salah satu bagian dari cara untuk meminimalkan resiko yang dipandang oleh politisi sebagai tantangan terbesar (Aspinall, 2016). Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa faktor pendorong dari adanya pengalokasian politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi pada politik kekerabatan tidak jauh dari sebuah strategi bagi aktor birokrat untuk mempertahankan dan melakukan perlindungan jabatan. Politik kekerabatan ini akan memudahkan untuk menjalankan pemerintahan melalui akses

keluarga yang mereka dukung sehingga mereka mencapai tujuan yang diharapkan seperti melindungi diri mereka.

3. Memperkuat Relasi Kerja

Kekerabatan pada dasarnya menimbulkan *pro* dan *kontra*. Dimana sebagian ada yang menganggap suatu hal baik sebab kestabilan politik terjaga dan sebagian pula ada yang menganggap politik kekerabatan itu sebuah alat pelanggaran kekuasaan yang digunakan para pejabat untuk mempertahankan kekuasaan (Faisol, 2018). Birokrasi dan legislatif merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan yang berfungsi untuk memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan publik dan undang-undang. Kerjasama antara birokrasi dan legislatif untuk memastikan efektivitas pemerintahan. Pelaksanaan kekuasaan negara akan berjalan dengan baik apabila komunikasi di antara lembaga eksekutif dan legislatif. Maka dari itu keduanya saling berkolerasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan dan memberikan keuntungan masing-masing. Komunikasi serta kerja sama diantara aktor birokrasi dan politisi satu partai politik ataupun lintas partai dilakukan ketika ada target politik tertentu yang ingin dicapai. Politisi legislatif berupaya bekerja bersama-sama dengan pejabat di eksekutif saat ada rancangan program kerja yang akan diwujudkan menjadi kebijakan publik.

4. Lemahnya Proses Rekrutmen Partai Politik

Birokrasi pemerintahan tidak bisa dilepaskan oleh keberadaan partai politik sebagai penggerak yang juga memberi pengaruh terhadap kehidupan birokrasi. Birokrasi pemerintahan biasanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan serta mampu memenangkan partai politik tertentu. Partai politik memiliki peran penting sebagai wadah untuk melahirkan calon-calon pemimpin di legislatif maupun eksekutif. Partai politik mendorong kandidat terbaiknya melalui rekrutmen politik. Pengrekrutan berdasarkan kualitas yang dilihat dari modal sosial, modal politik dan modal ekonomi yang dimiliki caleg tersebut.

Sumber daya manusia ini bisa diperebutkan untuk mendukung partainya. Maka dari itu upaya partai politik menguasai sumber daya untuk kepentingan partainya tidak bisa dihindari. Birokrasi akan senantiasa menjadi incaran partai politik yang berkuasa untuk membangun bangunan politiknya di birokrasi. Sehingga dorongan partai politik dalam ikatan kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi ini sulit dihindari untuk menjadikan birokrasi netral (Thoha, 2012).

5. Rendahnya Pandangan Masyarakat Terhadap Politik Kekerabatan

Politik kekerabatan yang saat ini sangat populer dan berkembang di seluruh daerah menjadi salah satu keuntungan bagi elit politik yang terlibat. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya dan kurangnya evaluasi terkait politik kekerabatan bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga menjadi faktor pendorong dalam pengalokasian sumberdaya birokrasi untuk kepentingan politik kekerabatan di pemilu 2024 khususnya pada pemilihan legislatif. Kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat juga menjadi bagian dari persepsi negatif terhadap politik kekerabatan. Masyarakat yang kurang memahami sistem politik dan proses pengambilan keputusan akan mudah terpengaruh oleh manipulasi politik. Sehingga mereka menerima praktik politik kekerabatan tanpa kritis. Masyarakat sebagai pemilih cenderung terpengaruh oleh *figure* yang dibelakang kandidat tersebut, mereka tidak memandang kandidat yang didasarkan pada visi misinya lagi.

6. Adanya Pengaruh Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi tidak pernah terlepas dengan urusan politik begitu juga sebaliknya. Adanya kekuasaan akan menjadi peluang yang besar untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kepentingan ekonomi sering kali menjadi faktor penting yang mendorong pengalokasian sumber daya birokrasi yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi keluarga dan jaringan. Pengaruh kepentingan ekonomi sangat besar karena dapat mengamani segala sesuatu yang telah direncanakan oleh aktor tersebut sehingga mereka menyiapkan keluarganya dalam lingkaran politik untuk dapat memberi kemudahan kedepannya ketika aktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang besar lagi maka keluarga atau kerabatnya dapat melanjutkan apa yang telah direncanakan kedepannya. Dalam hal ini, kepentingan ekonomi dan politik kekerabatan dalam jaringan aktor birokrasi saling mendukung. Keluarga yang terlibat dalam politik kekerabatan menggunakan kekuasaan mereka untuk mengamankan segala sesuatu yang telah dirancang di masa mendatang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan, politik kekerabatan seringkali dimanfaatkan atau dijadikan sebuah alasan untuk memberikan dukungan kepada kandidat calon legislatif yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Politik kekerabatan dijadikan sumberdaya jaringan dan sumberdaya identitas dalam

bentuk pemanfaatannya. Melalui jaringan kekerabatan tersebut telah menimbulkan tantangan terkait sifat yang kurang profesional bagi birokrasi di pemilihan legislatif tahun 2024. Hubungan kekerabatan telah dijadikan sebuah budaya bagi masyarakat untuk menentukan pilihan dan dukungan politik.

Pemanfaatan politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi dilakukan oleh aktor birokrasi dengan cara memobilisasi sumberdaya birokrasi yang ada. Terdiri dari lima faktor determinan gerakan sosial menurut teori mobilisasi sumberdaya Oberschall (1973) diantaranya yaitu pertama organisasi gerakan sosial, Kedua yaitu pemimpin dan kepemimpinan, Ketiga Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya, Keempat partisipasi dan jaringan sosial, dan Kelima peluang dan kapasitas masyarakat.

Beberapa faktor yang dijadikan keberhasilan suatu gerakan dalam mobilisasi sumberdaya menyatakan bahwa politik kekerabatan tidak menjamin kemenangan bagi kandidat yang memiliki kerabat atau keluarga di birokrasi, hal tersebut dibuktikan berdasarkan 4 calon legislatif pada pemilihan DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi tidak satupun yang menggunakan politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi dalam upaya memperoleh suara di pemilu 2024 Kabupaten Bangka Selatan meskipun memiliki kedekatan dan ikatan keluarga dengan salah satu pejabat publik yang notabennya seorang yang memiliki kuasa dalam suatu organisasi atau birokrasi pemerintahan daerah. Faktor yang melatarbelakangi bahwa aktor birokrasi tidak dapat maksimal dalam memberi dukungan dan mencari suara untuk keluarganya karena terhalang oleh jabatan publiknya. Sehingga mobilisasi sumber daya dilakukan hanya memperkenalkan saja dan secara *face to face* kepada pemilih yang memiliki hubungan dekat sebagai persahabatan, rekan kerja, dan kekerabatan.

Adapun faktor dorongan dari pengalokasian sumberdaya birokrasi pada politik kekerabatan di pemilu 2024 khususnya pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bangka Selatan yaitu adanya berkeinginan memperpanjang kekuasaan merupakan upaya yang sering kali melibatkan berbagai strategi politik salah satunya mendukung dan melanggengkan politik kekerabatan dengan cara perpanjangan tangan di legislatif, kemudian strategi mempertahankan dan perlindungan jabatan dengan membangun posisi politik yang strategis untuk keluarganya merupakan salah satu bagian dari cara untuk meminimalkan resiko yang dipandang oleh politisi sebagai tantangan terbesar. Namun adanya politik kekerabatan dalam birokrasi dapat memperkuat relasi kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak seperti program kerja bagi

birokrasi dan keuntungan politik bagi legislatif dengan tujuan masyarakat. Politik kekerabatan terjadi ketika ada dorongan dari partai politik yang mana dilihat dari proses perekrutan partai politik yang terbuka luas untuk kandidat yang mencalonkan diri tanpa melihat jaringan kekerabatan yang dimiliki sehingga praktik politik kekerabatan di birokrasi ini dianggap sah-sah saja dan tidak menjadi masalah dan memberi kesempatan dan peluang. Sehingga rendahnya pandangan masyarakat terhadap politik kekerabatan, Kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat juga menjadi bagian dari persepsi negatif terhadap politik kekerabatan. Masyarakat yang kurang memahami sistem politik dan proses pengambilan keputusan akan mudah terpengaruh oleh manipulasi politik. Serta terakhir adanya pengaruh kepentingan ekonomi, kepentingan ekonomi tidak pernah terlepas dengan urusan politik begitu juga sebaliknya. Adanya kekuasaan akan menjadi peluang yang besar untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian terkait politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan yaitu:

Relasi kekerabatan yang terdapat dalam birokrasi daerah hendaknya diimbangi dengan profesionalitas dan netralitas di dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan Masyarakat terhadap birokrasi dan mencegah terjadinya politik praktis. Selain itu, para aktor birokrasi sebaiknya memilih dan mendukung kandidat yang didasarkan pada kualitas, visi-misi dan pengalaman di dunia politik bukan berdasarkan ikatan kekerabatan dan kedekatan dengan caleg tersebut agar memperoleh wakil rakyat yang mampu bekerja untuk rakyat.

Perlunya kesadaran sosial dan politik bagi masyarakat terkait pentingnya memilih kandidat berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena ikatan kekerabatan atau tekanan birokrasi. Kesadaran politik ini dapat diberikan melalui edukasi politik seperti diskusi politik atau yang lebih dekat melalui media sosial agar masyarakat paham terkait

TENTANG PENULIS

Nama Putri, lahir di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 03 Oktober 2001. Alamat email dari penulis yaitu putrithra@gmail.com dan media sosial Instagram dengan nama @ptr.thra_ Motto hidup penulis adalah Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rukajat, (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta. CV Budi Utama.

Setiawan, I (2014). *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*. Indonesia. Irfan Setiawan.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sukmana, O. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang. Intrans Publishing.

Thoah, M (2014). *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta. Kencana.

Skripsi

Faisol, (2018). *Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bungurasih Tahun 2016*. Skripsi UIN Sunan Ampel.

Jumrah, (2018). *Politik Dinasti Dan Monopoli Kekuasaan (Studi Terhadap Berkuasanya Bangsawan Bima Di Pemerintahan)*. Skripsi UIN Alaudin Makassar.

Raissoevel, N. F. (2022). *Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

Siswandi, D. (2020). *Peran Jaringan Kekerabatan Dalam Praktik Politik Lokal di Desa Banyulegi*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Yunus. (2017). *Politisasi Birokrasipascapemilihan Kepala Daerah(Pilkada)(Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara)*. *Skripsi*, 1–89.

Jurnal

Abra, E. H. (2019). *Pemilu Serentak Di Indonesia (Antara Original Intent Dan Implementasi)*. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 34–49.

Aspinall, E. (2016). *Understanding Family Politics: Successes And Failures Of Political Dynasties In Regional Indonesia*. *South East Asia Research*. 1-16

Firnas, M.A (2011). *Evaluasi Reformasi Birokrasi: Masalah Politisi Birokrasi Dalam Politik Indonesia*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 5, No. 2.

Rayadi, R.M & M, E. (2014). *Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1–14.

Suryanjari, E. (2009). *Catatan Kritis terhadap Politisasi Birokrasi dalam Pemilu*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 3(1), 55–63.